



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 100.3.3.3/603 /PDG/2026

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PADANG TAHUN 2026

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- | | |
|--------|--|
| KESATU | : Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kota Padang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kota Padang Tahun 2026 meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatnya komitmen dalam implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah; b. penguatan Kelembagaan PUG; dan c. implementasi pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah, implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) dan optimalisasi pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender. |
| KETIGA | : Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Daerah Kota Padang Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. rencana aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi Pengarusutamaan Gender; b. penanggung jawab, yang memuat organisasi perangkat daerah dan/atau kelompok kerja yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut; c. instansi terkait, yang memuat instansi/kelompok kerja/tim yang terkait dalam mendukung dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut; d. kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (outcome) dari pelaksanaan aksi tersebut; e. ukuran keberhasilan, yang memuat keluaran (output) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indicator dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut; dan f. keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing masing pelaksanaan aksi. |

- KEEMPAT : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Padang Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Juni 2026

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth; :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 100.3.3.3/603 /PDG/2026
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN
 GENDER KOTA PADANG TAHUN 2026

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PADANG TAHUN 2026

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH							
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah							
1. Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	1. Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkannya regulasi/ Kebijakan sebagai landasan hukum penyelenggaraan PUG secara komprehensif	B03 :		B03 :
					-		-
					B06 : 1. Ditetapkannya regulasi/ Kebijakan sebagai landasan hukum penyelenggaraan PUG secara komprehensif (Perda/Perkada/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)		B06 : 1. Scan regulasi/ Kebijakan sebagai landasan hukum penyelenggaraan PUG secara komprehensif (Perda/Perkada/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)
					B09 : Publikasi regulasi/kebijakan sebagai landasan hukum penyelenggaraan PUG secara komprehensif		B09 : Scan link publikasi regulasi/kebijakan sebagai landasan hukum penyelenggaraan PUG secara

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kota Padang.		komprehensif yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kota Padang.
					B12 : -		B12: -
2. Regulasi/kebijakan penyelenggaraan PUG oleh Pemerintah Kota Padang mengintegrasikan gender ke seluruh 7 (tujuh) proses pembangunan	Pemerintah Kota Padang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat	2. Telah mengintegrasikan gender ke seluruh 7 (tujuh) proses pembangunan	Adanya integrasi gender ke seluruh 7 (tujuh) proses pembangunan	B03 : -		B03 : -
					B06 : Integrasi gender ke seluruh 7 (tujuh) proses pembangunan (hanya: Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan)		B06: Scan bukti dan lampirkan integrasi gender (Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan)
					B09 : Integrasi gender ke seluruh 7 (tujuh) proses pembangunan (hanya: Pemantauan, evaluasi dan pengawasan)		B09 : Scan bukti dan lampirkan integrasi gender proses pembangunan (hanya: pemantauan, evaluasi dan pengawasan)
					B12 : -		B12 : -
3. Pemda Kota Padang	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	3. Tersedianya pedoman RANDA PUG Kota	Ditetapkannya RANDA PUG Kota Padang	B03 : -		B03 : -
					B06 :		B06:

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
memiliki rencana aksi daerah penyelenggaraan PUG		Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	Padang		Tersusunnya Pedoman RANDA PUG Kota Padang		Scan Pedoman RANDA PUG Kota Padang
					B09 : -		B09 : -
					B12 : -		B12 : -
4. Penetapan rencana pencapaian PUG	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	4. Tersedianya tolak ukur pencapaian kinerja PUG sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kota Padang	Ditetapkannya Rencana pencapaian PUG di tingkat Kota Padang	B03 : -		B03 : -
					B06 : Tersusunnya Rencana Pencapaian PUG		B06 : Scan Rancangan Keputusan tentang Rencana Pencapaian PUG
					B09 : Ditetapkannya rencana pencapaian PUG		B09 : Scan Keputusan tentang rencana pencapaian PUG
					B12: -		B12 : -
5. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kota Padang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	5. Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03 : 1. Ditetapkannya Keputusan tentang Tim penyusunan RKPD 2. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD.		B03 : 1. Scan keputusan tentang Tim penyusunan RKPD. 2. Scan agenda kerja tim penyusunan RKPD
					B06 : 1. Rancangan RKPD di Kabupaten/Kota Tahun 2027, yang		B06 : 1. Scan rancangan RKPD 2027

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					memuat hal kesetaraan gender 2. Tersedianya indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender		2. Scan indikator terkait dengan kesetaraan gender
					B09 : Ditetapkannya Peraturan tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2027 yang memuat hal kesetaraan gender		B09 : Scan peraturan kepala daerah tentang RKPD kabupaten/kota tahun 2027
					B12 : -		B12: -
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG							
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota.							
6. Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG)	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	6. Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender di Kota Padang	Ditetapkannya Keputusan tentang Pembentukan Pokja PUG di Kota Padang	B03 : Draft Pembentukan Pokja PUG Kota Padang.		B03 : Scan draf Penetapan Pembentukan Pokja PUG
					B06 : Penetapan Pembentukan Pokja PUG Kota Padang		B06 : Scan Pembentukan Pokja PUG Kota Padang
					B09 : -		B09 : -
					B12 : -		B12 : -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Pembentukan <i>Focal Point</i> PUG pada seluruh OPD Kota Padang	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	7. Terfasilitasinya Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada masing masing OPD di Kota Padang	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kota Padang	B03 : -		B03: -
					B06 : Draf Penetapan tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kota Padang		B06 : Scan draf SK tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kota Padang
					B09 : Penetapan tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kota Padang		B09 : SK tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kota Padang
					B12 : -		B12 : -
8. Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kota Padang	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	8. Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	B03 : -		B03 : -
					B06 : Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kota Padang		B06 : Scan rencana kerja Pokja PUG Kota Padang
					B09 : -		B09 : -
					B12 : -		B12 : -
9. Pemda Kota Padang memiliki SDM terlatih PUG	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga	9. Adanya SDM Terlatih PUG di Kota Padang	Tersedianya SDM terlatih PUG dan Fasilitator PUG di Kota Padang	B03 : Jumlah SDM terlatih PUG		B03 : Scan bukti/sertifikat daftar SDM PUG
					B06 : Tersedia fasilitator PUG dan PPRG di Kota Padang		B06 : Scan bukti sertifikat/dokumen terkait fasilitator

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
		Berencana (DP3AP2KB)					PUG dan PPRG di Kota Padang
					B09 : -		B09 : -
					B12 : -		B12 : -
IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER							
Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah							
10.Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB))	10.Dipahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Terlaksananya Promosi dan advokasi pengarusutamaan gender 2. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya	B03 : -		B03 : -
					B06 : Persiapan dan rencana kegiatan promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender		B06 : Scan Persiapan dan rencana kegiatan promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender
					B09 : 1. Promosi dan advokasi pengarusutamaan gender 2. Tersedianya media promosi dan advokasi		B09 : 1. Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi PUG (dokumen) 2. Scan dokumen media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya.
					B12 : Penyusunan Laporan		B12: Scan laporan /

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kota Padang		Prosiding pelaksanaan sosialisasi pokja PUG Kota Padang
11.Program dan kegiatan OPD yang responsive gender	Pemerintah Kota Padang	BAPPEDA DP3AP2KB	11.Terinformasikan nya program dan kegiatan pada masing masing OPD yang masuk dalam kriteria program dan kegiatan yang harus responsive gender	Tersedianya data dan informasi tentang program dan kegiatan OPD yang masuk dalam kriteria program dan kegiatan yang harus responsive gender	B03 : -		B03: -
					B06 : -		B06 : -
					B09 : Program dan kegiatan OPD yang termasuk dalam kriteria program dan kegiatan yang dapat dianalisis menggunakan Analisis Gender		B09 : Scan program dan kegiatan OPD yang termasuk dalam kriteria program dan kegiatan yang dapat dianalisis menggunakan analisis gender
					B12 : -		B12: -
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)							
Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah							
12.Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG Kota Padang	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	12.Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kota Padang	Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Kota Padang	B03: Draf pembentukan Tim Penggerak / Driver		B03: Scan Draf Pembentukan Tim Penggerak / Driver
					B06: Ditetapkannya Tim Penggerak /Driver PPRG Kabupaten /Kota oleh Keputusan Kepala Daerah		B06 : Scan keputusan tentang penetaapan tim penggerak / Driver PPRG Pemerintah Kota Padang
					B09:		B09 :

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Implementasi pelaksanaan tugas tim penggerak/driver PPRG Kota Padang		Scan bukti implementasi pelaksanaan tugas tim penggerak / driver PPRG pemerintah Kota Padang
					B12: -		B12 : -
13. Publikasi Profil Gender Kabupaten/ Kota tahun 2026	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	13. Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten/ Kota pada website daerah	B03: -		B03 : -
					B06: Draf Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak		B06 : Scan draft pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak
					B09: 1. SK Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak 2. Tercetaknya Buku Profil Gender Kota padang		B09 : 1. Scan SK Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak 2. Softcopy buku profil gender kota Padang
					B12: Dipublikasikannya Profil gender Kota Padang dalam website resmi pemerintah daerah		B12 : Scan link profil gender Kota Padang tahun berkenaan pada website pemerintah daerah

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
							disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan
14. Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2027	Pemerintah Kota Padang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	14. Tersedianya pedoman kebijakan anggaran yang responsive gender berupa surat edaran dalam penyusunan KUA PPAS 2027	Ditetapkannya dokumen berupa Surat Edaran.	B03 : -		
					B06 : -		
					B09 : Ditetapkan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2027		B09 : Scan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2027
					B12 : -		B12 : -
15. Kebijakan umum anggaran/ prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS)	Pemerintah Kota Padang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD	15. Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen KUA PPAS	Ditetapkannya dokumen KUA PPAS Tahun 2027 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2026 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03 : -		B03 : -
					B06 : -		B06 : -
					B09 : 1. Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2026 a. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan		B09 : 1. Scan BAB I pendahuluan pada dokumen KUA PPAS perubahan tahun 2026 2. Scan nota kesepakatan KUA PPAS perubahan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					pada dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2026 b. Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2026 2. Rancangan KUA PPAS Tahun 2027		tahun 2026 3. Scan surat penyampaian rancangan KUA PPAS tahun 2027 ke DPRD
					B12: Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2027, yang memuat Substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS 2. Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2027		B12 : 1. Scan BAB I pendahuluan pada dokumen KUA PPAS tahun 2027 2. Scan nota kesepakatan KUA PPAS tahun 2027
16. Penyusunan Dokumen Anggaran yang responsive gender (analisis gender)	Pemerintah Kota Padang	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	16. Terwujudnya Program dan kegiatan OPD yang responsif gender di berbagai bidang pembangunan di daerah	Publikasi analisis Gender bisa gunakan alat analisis secara 9 langkah atau 4 langkah	B03: Melaksanakan penyusunan analisis gender pada program dan kegiatan menggunakan gender analisis (bisa gunakan 9 langkah atau 4 langkah) tahun 2027 B06:		B03 : Scan dokumen hasil alat analisis gender tahun 2027 B06 :

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
		(B03) 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (B06, B09) 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPD) (B12)			1. Penelaahan analisis gender (bisa gunakan 9 langkah atau 4 langkah) oleh tim penggerak / driver PPRG terhadap rencana kegiatan OPD Kota Padang 2. Publikasi pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 pada website resmi pemerintah daerah		1. Scan dokumen telah ditelaah oleh tim penggerak / driver PPRG kota Padang 2. Scan dokumen publikasi rencana kegiatan OPD pada wabsite resmi
					B09: Rekapitulasi Kegiatan OPD yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kota Padang		B09 : Scan Rekapitulasi Kegiatan OPD yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kota Padang
					B12: 1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh sekretariat PUG		B12 : Scan Laporan Pelaksanaan PPRG
17.Inventarisir Inovasi Daerah	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	17.Terdatanya Inovasi Daerah dalam	Ditetapkannya inovasi daerah terkait dengan kesetaraan dan	B03 : -		B03 : -
					B06 :		B06 :

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	percepatan tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	keadilan gender dalam pembangunan	Inventarisir Peraturan Daerah, Peraturan walikota, Surat Edaran dll terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan lima tahun terakhir.		Scan Perda, Perwako tentang daftar inovasi terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan 5 tahun terakhir
					B09 : -		B09 : -
					B12 : -		B12 : -
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG							
Terwujudnya kebijakan pengintegrasian gender dalam program pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran							
18. Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pemerintah Kota Padang	Inspektorat	18. Tersedianya pemantauan dan terhadap perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 19. Tersedianya klarifikasi dan identifikasi terhadap implementasi alat analisis gender (bisa gunakan 9 langkah dan 4 langkah)	1) Terlaksananya pemantauan terhadap perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2) Terlaksananya hasil klarifikasi dan identifikasi terhadap implementasi analisis gender tahun 2027	B03: -		
					B06: -		
					B09: Klarifikasi dan identifikasi implementasi analisis gender tahun 2026		B09 : Scan hasil klarifikasi dan identifikasi implementasi analisis gender tahun 2026
					B12: Klarifikasi dan identifikasi implementasi analisis gender tahun anggran 2027		B12 : Scan hasil Klarifikasi dan identifikasi implementasi analisis gender tahun anggran 2027

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN